KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Jangan Sampai ibarat Bayi Dipaksa Menjadi Remaja...
Tanggal : Selasa, 08 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Jangan Sampai ibarat Bayi Dipaksa Menjadi Remaja...

Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan akan menjadi kota pertama di Indonesia yang pembangunannya direncanakan sejak nol. Oleh karena itu, muncul harapan dari representasi organisasi profesi di bidang perencanaan, rancang kota, dan arsitektur agar tahapan pembangunan dilakukan sesuai aturan, inklusif, serta runut tanpa dibebani target politik.

Presiden Joko Widodo pada 2 April 2021 mengunggah video pradesain bangunan Istana Negara karya perupa Nyoman Nuarta. "Saya mengharapkan Istana Negara ini jadi kebanggaan bangsa, sekaligus mencerminkan kemajuan bangsa", tulis Presiden Jokowi di akun Twitter @jokowi.

Delapan bulan berselang, Nyoman Nuarta mengonfirmasi desain final Istana Negara di IKN Nusantara di akun Instagram-nya, @nyoman_nuarta. Desain itu dipresentasikan di Istana Merdeka, 3 Januari 2022, bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Secara umum, desain Istana Negara yang disebut Nyoman adalah desain final itu mirip dengan yang diunggah Presiden Jokowi. Salah satu yang menonjol, pada desain eksterior istana terdapat bangunan menyerupai bentangan sayap burung garuda. Nyoman Nuarta menyebut desain yang dibuatnya merupakan karya orisinal yang tidak dipengaruhi kaidah-kaidah arsitek kolonial.

Pada Jumat (4/2/2022), perwakilan sejumlah organisasi profesi arsitek dan perencana kota berbincang secara virtual dengan Redaksi *Kompas*. Mereka memberi masukan dan catatan kritis konstruktif terkait perencanaan pembangunan IKN Nusantara, termasuk arsitektur bangunan Istana Negara di IKN Nusantara.

Ketua Umum Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia Sibarani Sofian yang juga pemenang sayembara desain ibu kota negara mengatakan, Nusantara ibarat peluang bagi pemerintah dan masyarakat untuk membuat kota yang ideal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena itu, pembangunannya mesti runut mulai dari makro, meso, baru ke mikro sehingga pengerjaannya tidak bisa dilakukan secara serentak.

Model pengerjaan yang serentak dikhawatirkan memunculkan keterbatasan dari setiap kementerian sesuai tugas, pokok, dan fungsi masing-masing sehingga pengerjaannya bisa kurang baik. Dia menekankan, pembangunan sebuah kota membutuhkan proses panjang terintegrasi. Pekerjaan ini tak bisa diburu-buru target politik.

"Jangan sampai nantinya menjadi beban tambahan, ibarat bayi dipaksa menjadi remaja. Membangun kota butuh waktu. Bukan seperti membuat barang, tapi seperti membesarkan anak, harus dikasih nutrisi, harus ada orangtua yang benar. Tidak bisa datang dari tiga kementerian, satu buat kepala, satu buat badan, satu buat kaki. Harusnya sudah ada badan otorita yang dari awal mulai duluan," tuturnya.

Bangunan di IKN harus mencerminkan bentuk sikap dan fungsi bangsa yang tecermin dari desain arsitekturnya.

Ketua Umum Green Building Council Indonesia Irwan Prijanto menyebutkan, saat ini yang perlu dilakukan ialah mengubah paradigma bahwa membangun IKN bukan membangun infrastruktur saja, melainkan juga membangun kehidupan yang butuh jangka waktu panjang. Maka itu, tidak bisa pembangunan IKN dilakukan buru-buru.

Irwan memuji, di RUU IKN sudah ada penetapan luasan IKN mencapai lebih dari 200.000 hektar. Hal itu, lanjutnya, salah satu tujuannya untuk *land banking*. Dengan penetapan itu, dia menduga saat ini proses *land banking* sedang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

"Kalau ini belum selesai lalu PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) langsung bangun jalan dan sebagainya, swasta akan kebur caplok-mencaplok daerah yang belum selesai *land pricing*. Kalau sudah urusan caplok-mencaplok, maka bisa botak-botak, *sprawling* enggak karu-karuan. Penetapan jumlah besar *land banking* belum selesai, dan *land speculation* yang terjadi, maka beban akan berkali-kali lipat," katanya.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Hendricus Andy Simarmata menambahkan, berbagai masukan terkait pembangunan IKN sudah sering disampaikan. Masukan itu sebagian diterima dan sebagian lagi tidak. Setelah UU IKN disahkan, mereka ingin memberikan lagi masukan yang lebih sistematis dari berbagai sudut pandang pengetahuan dan keahlian setiap asosiasi profesi. Sebab, agenda pemindahan IKN merupakan agenda besar yang perlu memberikan tempat bagi masyarakat untuk memberi masukan.

Terkait rencana induk IKN, misalnya, dia mengusulkan desain itu diuji oleh para ahli. Bukan untuk mencari kelemahan, tetapi untuk menyempurnakan sisi yang masih bolong-bolong. "Karena ini rencana bersama," ucapnya.

Desain Istana Negara

Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia Gregorius Budi Yulianto berpendapat, bangunan di IKN Nusantara harus mencerminkan sikap dan fungsi yang tecermin dari desain arsitekturnya. Namun, ia menilai, desain Istana Negara dengan bentangan sayap garuda kurang tepat. "Bangunan di IKN harus mencerminkan bentuk sikap dan fungsi bangsa yang tecermin dari desain arsitekturnya," ujarnya.

Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menegaskan, desain arsitektur di IKN sudah mencerminkan keindonesiaan sesuai visi IKN yang menjadi simbol identitas nasional. Pembangunannya juga sudah melalui berbagai kajian komprehensif, tidak mendadak langsung ke detail pembangunan. Sejumlah pihak telah dilibatkan dalam proses ini. "Konsep pengembangan IKN termuat dalam rencana induk dan rencana detail," ucapnya.

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melibatkan masyarakat dalam pembentukan regulasi turunan UU IKN. Setidaknya ada 10 regulasi turunan yang saat ini sedang disusun pemerintah terkait IKN, terdiri dari 3 peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, 1 keputusan presiden, dan 1 peraturan kepala otorita IKN.

Menurut Puan, keterlibatan rakyat dalam proses perpindahan ibu kota negara sangat penting. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi menentukan arah kebijakan negara. Partisipasi publik yang sudah terjadi saat proses pembentukan UU di DPR tidak boleh terputus saat pembentukan regulasi turunan sekalipun sebagian menjadi diskresi pemerintah.

"Kami berharap, pemerintah mengajak berbagai elemen masyarakat ikut aktif dalam pembahasan regulasi pembentukan ibu kota negara baru seperti yang dilakukan DPR saat penyusunan UU IKN," ujar Puan. (IQBAL BASYARI)